

**PENGARUH PERKEMBANGAN KEPARIWISATAAN
DAN SISTEM KEKERABATAN TERHADAP SISTEM BAGI HASIL
USAHA TANI PADI SAWAH DI BALI**

**Ketut Budi Susrusa dan Saptono Iqbali
Jurusan Sosek Fak. Pertanian UNUD**

ABSTRACT

High population growth led to a scarcity of arable land in Indonesia. During 1963-1993 periods, farmer households have increased 1.77% i.e, almost three times than the extend of agricultural land. Soe, the land that is held by the farmer households were not only decreased in its size, but also increased in its inequality. Furthermore, this phenomenon encouraged the existence of share cropping contract. Sharecropping contract is an old institution that was known since Babylonian era (± 2300 BC) and still showing controversial issues related to agricultural productivity. Certainly, the institution that was born in along history of mankind could not be easily change, however some modification should be conducted along with the implementation of recent agricultural development programs.

The objectives this study was identify the change of sharecropping contract on rice farming along with development of economy in Bali which was also stimulated by development of tourism and to learn weather or not sharecropping contract was contra productive in terms labor used and farming performance.

This study was conducted at the subaks area, three within and three others of tourism area. The population was classified into three group, owner-cultivator, non-kinship-sharecropper, kinship- sharecropper. Farming intensity was measured by the indicator of the used of labor and inputs, whereas farm performance will be evaluated by land productivity and farm income. This study reveals that the more developed economy within a region, the better sharecropper' s bargaining position. Furthermore, kinship-sharecropping contract was as not bad as the general opinion that is not agreed to sharesropping contract.

Labor utilization and farm performance both in kinship sharecropping were consistent with enforceable contract that is led to optimizing input allocation. From the view points of owners-sharecropping relationships it was indicated that the owners held control upon the allocation of farm inputs.

Keyword : farmer households, sharecropping, agricultural development, labor, farm income.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Selama 30 tahun yaitu dari tahun 1963 - 1993 terjadi kecenderungan bahwa rata-rata penguasaan lahan rumah tangga petani semakin menurun di Indonesia dengan laju 0,846% per tahun (BPS, 1963; BPS, 1983; BPS, 1993). Bersamaan dengan itu, terjadi pula polarisasi penguasaan lahan (Sajogjo, 1983; BPS, 1993) yang pada gilirannya menyebabkan semakin meningkatnya rumah tangga petani yang "menerima" lahan dari orang lain. Seluruh rumah tangga petani yang "menerima" lahan dari orang lain, ternyata lebih banyak (57,56%) terikat dalam hubungan bagi hasil (Sajogjo, 1983).

Bagi hasil sebagai pranata dalam bidang produksi pertanian yang telah dikenal sejak zaman Babilonia (±2300 SM) telah lama menimbulkan pro-kontra dalam kaitannya dengan produktivitas usahatani (Scheltema, 1984). Di satu pihak, ada pendapat yang menyatakan bahwa usahatani yang dikerjakan dengan bagi hasil tidak efisien dibandingkan dengan yang dikerjakan dengan sewa-tunai dan yang dikerjakan pemilik, menghambat kemajuan pertanian, dan merugikan. Di pihak lain, ada pendapat yang menyatakan bahwa teori ketidak-efisienan alokasi input pada bagi hasil tidak benar.

Bagi hasil juga merupakan bentuk atau sistem penguasaan tanah pertanian yang lazim dan sejak lama berlaku di Bali. Sepanjang diketahui, laporan tentang bagi hasil di Bali pada zaman penjajahan ditulis oleh Lieftrinck pada 1890 (Scheltema, 1984). Kemudian, setelah kemerdekaan Raka (1955) melaporkan bahwa, pada saat itu lahan yang dikerjakan dengan bagi hasil mencapai 29% dari 96.423 hektar lahan sawah. Selanjutnya, berdasarkan sensus pertanian (BPS, 1963; BPS, 1993) dapat ditunjukkan bahwa, walaupun petani yang menerima lahan dari orang lain secara proporsional cenderung menurun, tetapi secara absolut meningkat. RT petani yang menerima lahan dari orang lain berjumlah 115.265 pada 1963 meningkat menjadi 116.639 pada 1993.

Studi tentang bagi hasil menarik dilakukan di daerah Bali dalam hubungannya dengan perkembangan pembangunan Bali mutakhir. Bagus dkk. (1988) menyatakan kemajuan ekonomi di Bali telah membawa perubahan mendasar pada masyarakat Bali yaitu dari masyarakat agraris menjadi masyarakat transisi/pascatradisional dan tampaknya akan terus berlanjut menuju masyarakat industri/nonagraris. Kemajuan ekonomi yang demikian pesat didorong oleh sektor pariwisata yang telah menjadi *engine of growth* (motor penggerak) pembangunan daerah Bali sejak 1970-an (Hassal and Associates, 1992 dalam Pitana, 1992). Walaupun perkembangan perekonomian Bali tergolong pesat yang telah berhasil menempatkan Bali sebagai salah satu propinsi termakmur di Indonesia (Mubyarto, 1992 dalam Bagus dkk, 1992), tetapi terjadi ketimpangan yang cukup besar secara regional (kabupaten) baik dilihat dari pendapatan per kapita maupun struktur kesempatan kerja yang disebabkan oleh tidak meratanya perkembangan kegiatan pariwisata.

Berbagai fenomena yang menunjukkan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya bersamaan dengan perkembangan pariwisata di Bali telah diungkapkan melalui berbagai studi, seperti: tersedotnya sumber daya lahan sawah, terganggunya sistem pengairan, terancamnya eksistensi dan kegotong-royongan subak, dan semakin kompleksnya orientasi masyarakat (Dulbahri, 1995; Mickler, 1994; Drysdale dan Zimmerman, 1995 dalam Suryawan Wiranatha, 2001; Bappeda Propinsi Bali, 2001; Pemayun, 2003)

Berdasarkan adanya gejala perubahan seperti itu, apakah lembaga bagi hasil di Bali ikut mengalami perubahan? Dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi, Schimmer (1995) menyatakan bahwa semakin maju masyarakat, semakin lemah ikatan kekerabatan yang disebabkan oleh semakin dominannya ekonomi pasar dan berkembangnya jasa-jasa sosial. Dengan demikian, masihkah hubungan antara pemilik lahan dan penyakap yang diwamai semacam hubungan kekerabatan seperti yang dinyatakan Soemardjan bertahan? Jika masih, apakah itu berlaku secara umum di Bali?

Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di Bali kemungkinan telah mempengaruhi karakter yang melandasi hubungan antara penyakap dan pemilik lahan dalam ikatan bagi hasil yang sebelumnya dilandasi oleh karakter sosial menjadi karakter ekonomi. Masalah yang diidentifikasi tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh kemajuan pariwisata serta pengelolaan lahan yang dikerjakan penyakap dengan hubungan kekerabatan, penyakap tanpa hubungan kekerabatan, dan bukan penyakap terhadap penggunaan tenaga kerja dan kinerja usahatani padi sawah?¹
2. Bagaimanakah pengaruh kemajuan pariwisata terhadap preferensi petani pada pranata yang berkaitan dengan transaksi tanah-tenaga kerja?

Maksud, Tujuan, dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud (1) untuk mengkaji pengaruh kepariwisataan sebagai faktor pendorong kemajuan masyarakat dan bagi hasil yang dicirikan perbedaan jarak sosial sebagai pranata pengambil keputusan dalam pengelolaan usahatani terhadap penggunaan tenaga kerja dan kinerja usahatani pada usahatani padi sawah, dan (2) mengkaji pengaruh kepariwisataan sebagai faktor pendorong kemajuan masyarakat terhadap perubahan preferensi petani tentang pranata yang berkaitan dengan transaksi tanah-tenaga kerja. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang aktual dan benar pada pranata bagi hasil di Bali pada saat ini. Informasi itu penting untuk mempertajam 'wilayah kerja' Teori Marshall tentang *share tenancy* dan juga untuk merumuskan kebijakan tentang bagi hasil yang tepat sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

¹Penyakap dengan kekerabatan berarti penyakap dan pemilik lahan terikat hubungan kekerabatan yang dibatasi seperti dijelaskan pada definisi konsep (butir 3) dan sebaliknya untuk penyakap tanpa kekerabatan. Bukan penyakap berarti pemilik-penggarap. Selanjutnya, istilah penyakap mengacu pada orang yang mengelola lahan, sedangkan bagi hasil mengacu pada bentuk penguasaan lahan. Dengan demikian, istilah penyakap dengan/tanpa kekerabatan dan bagi hasil dengan/tanpa kekerabatan digunakan bergantian.

Kerangka Pemikiran

(1) Pengaruh Hubungan Kekerabatan terhadap Penggunaan Tenaga Kerja dan Kinerja Usaha Tani

Di dalam teorinya tentang *share tenancy*, Alfred Marshall seorang ekonom neoklasik, menyatakan bahwa penggunaan input dan juga produktivitas pada usahatani bagi hasil lebih rendah dibandingkan pada usahatani sewa-tunai maupun usahatani yang dikerjakan pemilik (Ghatak dan Ingersent, 1984). Alasannya sangat sederhana, karena penyakap bagi hasil mendapatkan hanya sebagian dari output yang ia produksi (*tax equivalent*) maka ia memiliki insentif yang kurang untuk menggunakan tenaga kerja dan input lainnya ke dalam proses produksi. Di lain pihak, penyakap sewa-tunai memperoleh seluruh insentif berupa seluruh output yang ia produksi sehingga ia memiliki insentif penuh untuk menggunakan tenaga kerja dan input lainnya seperti penggarap yang mengerjakan lahannya sendiri.

Pendapat Marshall sangat masuk akal sepanjang asumsi-asumsi yang melandasinya benar, seperti setiap individu bertujuan memaksimalkan kepuasan dari setiap tindakan ekonominya (rasional) dan transaksi terjadi di pasar dalam keadaan persaingan sempurna. Seperti yang dikemukakan Mubyarto (1993), teori ekonomi neoklasik sangat cocok diterapkan pada kelompok masyarakat "kapitalistik". Sedangkan, di negara-negara berkembang dimana masyarakatnya masih tradisional, hubungan *patron-client* sering tampak (Ruttan, 1985). Soemardjan (1970) menyatakan bahwa, hubungan antara pemilik lahan dan penyakap di Jawa Tengah dan Barat tidak mumi didasari oleh kepentingan ekonomi tetapi oleh karakter sosial. Pada banyak kasus hubungan tersebut berkembang menjadi semacam hubungan kekerabatan antara anggota lebih tua dan lebih muda pada satu keluarga. Pada individu-individu yang terikat hubungan kekerabatan ada kewajiban resiprokal (Murdock, 1949). Kewajiban resiprokal mencerminkan hubungan kerja-sama yang pada gilirannya meminimumkan *moral hazard*. Penyakap yang dapat bekerjasama dengan pemilik lahan menggunakan tenaga kerja lebih banyak pada usahatannya dibandingkan penyakap yang tidak dapat bekerjasama (Sadoulet et al, 1997). Dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak, pemilik dapat mengarahkan penggunaan input yang diinginkan tanpa penolakan oleh penyakap sehingga penggunaan input pada usahatani bagi hasil kekerabatan lebih tinggi dibandingkan bagi hasil tanpa kekerabatan. Dalam hal ini, Cheung (1969) berpendapat bahwa, efisiensi bagi hasil bisa dicapai jika pemilik lahan mampu menetapkan tingkat penggunaan input variabel (tenaga kerja).

Seperti diuraikan pada latar belakang, kemajuan ekonomi di Bali telah membawa perubahan mendasar pada masyarakat Bali yaitu dari masyarakat agraris menjadi masyarakat transisi/pascatradisional dan tampaknya akan terus berlanjut menuju masyarakat industri/nonagraris. Perkembangan ini mungkin akan membawa akibat pada hubungan kekerabatan di Bali karena seperti yang dikemukakan (Schwimmer, 1995) bahwa, semakin maju masyarakat semakin lemah kekerabatan. Oleh karena itu, kemajuan ekonomi diduga berpengaruh terhadap penggunaan tenaga kerja dan kinerja usahatani yang dikelola dalam bentuk bagi hasil

(2) Pengaruh Kemajuan Ekonomi terhadap Keberadaan Bagi Hasil

Dalam praktek, bagi hasil terus tumbuh dengan subur sebagai salah satu bentuk utama cara "menyewa" lahan pertanian, tidak hanya di negara-negara dunia ketiga tetapi juga di negara maju. Sebagai contoh, bagi hasil teramat banyak dipraktikkan di AS Barat-Tengah (Chaudhuri dan Maitra, 2000). Banyak tulisan mencoba menjelaskan berkembangnya bagi hasil dengan berbagai pendekatan yaitu pendekatan 'pembagian risiko' dengan asumsi adanya etika subsistensi pada petani kecil (Scott, 1993), "ketidakpastian" produksi pertanian karena teknik pertanian yang terbatas (Chaudhuri dan Maitra, 2000), dan pendekatan 'keterbatasan dana' karena kemiskinan petani (Shetty, 1989; Basu, 1992; Laffon dan Mataousi, 1995).

Pemikiran yang sangat berpengaruh dalam usaha menjelaskan berkembangnya bagi hasil adalah pemikiran tentang 'pembagian risiko'. Tidak ada yang memperdebatkan bahwa tujuan kebanyakan petani berusahatani adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri beserta keluarganya. Scott (1993) menyatakan bahwa petani subsisten, karena kemiskinan yang begitu dekat dengan 'garis batas' untuk hidup menjadikannya bersikap enggan risiko (*risk aversion*) dalam pengambilan keputusan. Petani yang enggan risiko akan memilih menghindari kegagalan yang akan menghancurkan kehidupannya beserta keluarganya dari pada berusaha memperoleh keuntungan besar dengan mengambil risiko.

Selain faktor psikis seperti yang dinyatakan Scott di atas, proses produksi pertanian, khususnya di negara berkembang, sebagian besar masih bergantung pada alam yang tidak pasti karena keterbatasan teknologi. Hal itu menyebabkan petani lebih menyukai bagi hasil dari pada sewa-tunai. Dengan memilih bagi hasil memberikan kesempatan kepada petani (penyakap) berbagi risiko dengan pemilik dibandingkan memilih sewa-tunai dimana risiko menjadi tanggungannya sendiri. Dalam hubungannya dengan ini (Chaudhuri dan Maitra, 2000) menyatakan bahwa dengan berjalannya waktu bagi hasil akan menjadi usang yang disebabkan modernisasi pertanian yang menyangkut introduksi teknologi baru, usaha memperkecil risiko melalui asuransi tanaman, dan memperbanyak ketersediaan kredit.

Pemikiran lain yang pada hakekatnya sejalar dengan pendekatan 'pembagian risiko' adalah pemikiran tentang kendala keterbatasan keuangan yang mempengaruhi pilihan jenis kontrak. Shetty (1989 dalam Ray dan Singh, 2000) menyatakan bahwa

bagi penyakap dengan tingkat kesejahteraan cukup untuk menjamin pembayaran penuh kepada pemilik, kontrak yang optimal baginya adalah sewa-tunai. Sejalan dengan pendapat tersebut, Basu (1992 dalam Roy dan Serfes, 2000) menyatakan bahwa pada daerah-daerah miskin, yang secara implisit terkandung dalam frase 'keterbatasan keuangan', kontrak bagi hasil umum dilakukan. Selanjutnya, Ray dan Singh (2000) mengajukan proposisi sebagai berikut. Bila ada keterbatasan keuangan:

- a. Penyakap lebih kaya (yang tidak terikat keterbatasan keuangan) menerima kontrak sewa-tunai dan menjalankan tingkat kerja yang efisien;
- b. Penyakap kurang kaya (yang terikat keterbatasan keuangan) menerima kontrak bagi hasil yang tidak efisien;
- c. Semakin kaya penyakap bagi hasil maka bagian yang diterimanya dan tingkat kerjanya meningkat dan harapan utilitas pemilik juga meningkat.

Pariwisata sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi di Bali telah berhasil mendorong tumbuhnya beragam lapangan usaha dan kesempatan kerja yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat (Pitana dan Sudarna, 1992). Selain itu, telah terjadi perubahan struktural dalam kesempatan kerja (Bendesa, 1997). Peningkatan kesempatan kerja luar pertanian akan berpengaruh positif bagi petani. Seperti yang dinyatakan oleh Sajogjo (1976), semakin kecil lahan garapan petani semakin besar persentase pendapatan keluarga yang berasal dari sumber-sumber dari luar pertanian. Dengan terjadinya perubahan seperti itu, diduga petani di daerah pariwisata lebih memilih kontrak sewa-tunai dibandingkan dengan bagi hasil.

Kerangka berpikir seperti yang telah diuraikan di atas secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 1.

Hipotesis

Hipotesis-hipotesis verifikatif yang disusun berdasarkan pada kerangka pemikiran di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh bagi hasil kekerabatan, bagi hasil tanpa kekerabatan, dan bukan bagi hasil (pemilik-penggarap) terhadap penggunaan tenaga kerja dan kinerja usahatani bergantung pada tingkat kemajuan pariwisata.
2. Preferensi petani terhadap bagi hasil cenderung menurun sedangkan preferensi terhadap sewa-tunai cenderung meningkat dengan semakin majunya pariwisata.

METODE PENELITIAN

Daerah Penelitian

Penelitian dilakukan di kawasan pariwisata dan bukan kawasan pariwisata di Propinsi Bali. Lokasi penelitian di kawasan pariwisata adalah: Subak Intaran Kecamatan Denpasar Selatan Kotamadya Denpasar, Subak Basangkasa Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, dan Subak Juwuk Manis Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. Sedangkan di kawasan bukan pariwisata adalah: Subak Kekeran Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, Subak Tembuku Kangin Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli, dan Subak Ganggangan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.

Prosedur Pengumpulan Data dan Rancangan Pengambilan Contoh

Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: Penyusunan kerangka sampling (April-Juli 2001), pencatatan harian penggunaan tenaga kerja keluarga petani (kegiatan/pekerjaan di dalam usahatani dan luar usahatani) selama satu musim tanam (Agustus-Nopember 2001), dan survai usahatani melalui wawancara terstruktur serta mendalam (Desember 2001-Juni 2002).

Teknik Pengambilan dan Besar Contoh

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah petani penyakap bagi hasil tanpa kekerabatan, penyakap bagi hasil dengan kekerabatan, dan petani pemilik-penggarap mumi. Penarikan contoh dilakukan dengan *Stratified simple random sampling*. Contoh dialokasikan secara proporsional pada masing-masing stratum. Faktor yang dipertimbangkan untuk membuat strata dalam penelitian ini adalah: luas lahan garapan dan letak lahan dalam hubungannya dengan sumber air irigasi. Jumlah seluruh responden yang diamati pada penelitian ini adalah 180 orang yaitu masing-masing 90 orang petani di daerah pariwisata dan bukan pariwisata. Contoh petani di daerah pariwisata terdiri atas: 35 orang pemilik-penggarap, 30 orang penyakap tanpa kekerabatan, dan 25 orang penyakap dengan kekerabatan. Sedangkan contoh petani di daerah bukan pariwisata, masing-masing sebanyak 30 orang pemilik-penggarap, penyakap tanpa kekerabatan, penyakap dengan kekerabatan.

Definisi Konsep dan Operasionalisasi Variabel

Beberapa konsep penting yang perlu dibatasi terkait dengan penelitian ini adalah:

- Hubungan bagi-hasil adalah suatu bentuk pemanfaatan tanah, dimana pembagian hasil terhadap dua unsur produksi yaitu modal dan tenaga kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil kotor tanah tersebut dan dalam bentuk natura sesuai dengan perkembangan usahatani.
- Bagi hasil tanpa kekerabatan merupakan bagi hasil dimana pemilik dan penyakap tidak terikat hubungan kekerabatan.
- Bagi hasil kekerabatan merupakan bagi hasil dimana pemilik dan penyakap terikat hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan dibatasi sampai pada kerabat tersier.
- Kekerabatan didefinisikan sebagai prinsip pengelompokan individu yang mengungkapkan hubungan sanak keluarga berdasarkan hubungan darah dan perkawinan.
- Kerabat tersier adalah hubungan kekerabatan dimana seorang anggota kerabat tersier digabung dengan kerabat primer anggota kerabat sekunder (contoh: buyut, sepupu, dan lain-lain).
- Bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan.

Variabel-variabel yang terkandung dalam hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Tingkat penggunaan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam usahatani.
- Alokasi tenaga kerja adalah persentase penggunaan tenaga kerja petani untuk bekerja di luar usahatannya baik kegiatan pertanian maupun bukan pertanian.
- Kinerja usahatani didefinisikan sebagai kemampuan usahatani untuk memenuhi harapan masyarakat dan pemilik faktor produksi yang terlibat dalam usahatani. Kinerja usahatani diukur dengan produktivitas lahan per ha, pendapatan kerja petani per ha, pendapatan kerja keluarga per ha, dan pendapatan kerja keluarga per HOK.
- Produktivitas lahan adalah jumlah gabah kering panen yang dihasilkan setiap ha lahan sawah.
- Pendapatan kerja petani adalah total penerimaan dikurangi total pengeluaran.
- Total pengeluaran adalah semua pengeluaran baik tunai (pembelian pupuk, benih, sewa tenaga kerja luar keluarga, pajak, bunga, dlsb) maupun bukan tunai (penyusutan peralatan, penggunaan tenaga kerja dalam keluarga, penggunaan benih hasil usahatani sendiri, dlsb).
- Total penerimaan adalah semua penerimaan baik tunai (penerimaan yang diperoleh dari penjualan padi, program bantuan pemerintah, dlsb) maupun bukan tunai (padi yang dikonsumsi sendiri, padi yang disumbangkan ke kerabat, dlsb).
- Preferensi adalah kecenderungan seseorang untuk menyukai salah satu dari berbagai pilihan, satuannya persentase suka/tidak suka.
- Kuosien bagi hasil adalah perbandingan hasil maupun biaya yang diterima pemilik dan penyakap.

Pengolahan, Analisis Data, dan Pengujian Hipotesis

(1) Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul melalui prosedur pengumpulan data seperti yang dijelaskan sebelumnya, selanjutnya ditabulasi pada *Excell Spreadsheet*. Sebelum ditabulasi data tersebut diedit dan diberikan kode. Sesuai dengan skala bilangan data yang dikumpulkan, statistik yang disajikan adalah: rata-rata dan simpangan baku untuk skala bilangan rasio; dan persentase untuk skala bilangan nominal.

(2) Analisis Usahatani

Pendapatan bersih usahatani dihitung dengan format perhitungan "laporan rugi-laba" (*income statement*) yang dibuat berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran dalam satu musim tanam padi yang diperoleh dari hasil wawancara.

(3) Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hipotesis yang diajukan maka rancangan uji hipotesis yang digunakan adalah: Analisis varians (Anava) klasifikasi dwi arah dan uji hipotesis perbedaan dua perbandingan serta analisis deskriptif. Uji pertama digunakan untuk menguji hipotesis 1 dan yang kedua digunakan untuk menguji hipotesis 2. Analisis varians klasifikasi dwi arah digunakan untuk pengujian hipotesis 1, karena dalam hipotesis 1 meliputi enam (2×3) kasus/kategori yaitu dua kategori daerah (pariwisata dan bukan pariwisata) dan tiga kategori sistem penguasaan lahan yang dikelompokkan/distratifikasi berdasarkan jarak dari sumber air dan skala usahatani (Sudradjat Sutawidjaja, 1993). Selain itu, analisis ini mempunyai keunggulan lain yaitu dapat menguji saling ketergantungan pengaruh (interaksi) antar kategori (Gasperz, 1991). Program statistik (*software*) yang digunakan untuk analisis statistik adalah Minitab.

- (a) **Analisis varians:** Pengujian tentang penggunaan tenaga kerja dan kinerja usahatani yang dikelola penyakap bagi hasil tanpa kekerabatan dan dengan kekerabatan serta pemilik di daerah pariwisata dan bukan pariwisata

Model linier dari rancangan uji ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{jkm} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_k + \delta_l + (\gamma\delta)_{kl} + \epsilon_{jkm}$$

Keterangan:

Y_{jkm} = Peubah respons pada pengamatan ke-m dari lokasi ke-i, luas garapan ke-j, sistem penguasaan lahan ke-k, dan kemajuan ekonomi daerah ke-l

μ = Rata-rata umum.

α_i = Varians yang ditimbulkan oleh adanya faktor stratifikasi yaitu lokasi usahatani dari sumber air (i = hulu, tengah, hilir)

β_j = Varians yang ditimbulkan oleh adanya faktor stratifikasi yaitu perbedaan luas lahan garapan (j = besar, kecil)

γ_k = Varians yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan sistem penguasaan lahan (k = bagi hasil tanpa kekerabatan, bagi hasil kekerabatan, dan pemilik-penggarap)

δ_l = Varians yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan kemajuan pariwisata daerah dimana usahatani berada (l = daerah pariwisata, daerah bukan pariwisata).

$(\gamma\delta)_{kl}$ = Pengaruh interaksi antara faktor sistem penguasaan lahan dan faktor kemajuan pariwisata.

ϵ_{jkm} = Pengaruh Galat yang timbul dari pengamatan ke-m dan kombinasi perbedaan ijkl.

Hipotesis yang diuji untuk model linier di atas adalah:

1) H_0 : $\gamma_i = 0$ (tidak ada pengaruh variasi γ terhadap respon yang diamati).

H_1 : Minimal ada satu $\gamma \neq 0$, artinya ada pengaruh variasi γ terhadap respon yang diamati.

2) H_0 : $\delta_l = 0$ (tidak ada pengaruh variasi δ terhadap respon yang diamati).

H_1 : Minimal ada satu $\delta \neq 0$, artinya ada pengaruh variasi δ terhadap respon yang diamati.

3) H_0 : $(\gamma\delta)_{kl} = 0$ (tidak ada pengaruh interaksi variasi γ dan δ terhadap respon yang diamati).

H_1 : Minimal ada satu $(\gamma\delta)_{kl} \neq 0$, artinya ada pengaruh interaksi variasi γ dan δ terhadap respon yang diamati.

Kaedah keputusan: Jika $F_{ij} \geq F_{tab}$, H_0 ditolak, H_1 diterima. Jika dari uji varians, pengaruh interaksi variasi γ dan δ terhadap respon yang diamati nyata maka uji dilanjutkan dengan uji beda pengaruh sederhana variansi sistem penguasaan lahan dan kemajuan ekonomi.

(b) Analisis deskriptif: Pengujian tentang preferensi petani terhadap sistem bagi hasil dan sewa-tunai

Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis 2 adalah analisis deskriptif. Dari lembaran tabulasi dibuat tabel silang berkenaan dengan preferensi petani pada setiap kelompok (pemilik-penggarap, bagi hasil tanpa kekerabatan, dan bagi hasil dengan kekerabatan) dan daerah (pariwisata dan bukan pariwisata) terhadap sewa-tunai. Selanjutnya berdasarkan nilai-nilai variabel yang terkandung pada setiap sel di dalam tabel tersebut dijelaskan keterkaitannya.

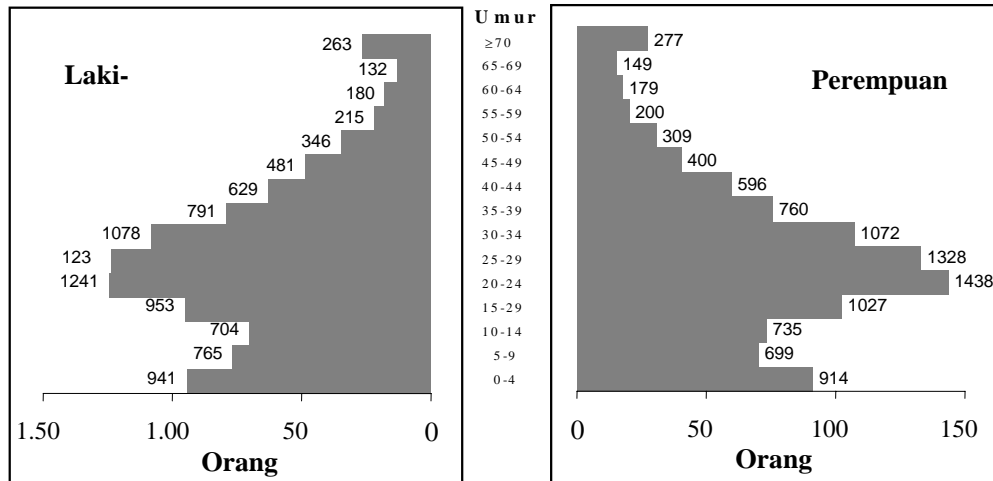
GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Desa-desa (Wilayah Administratif) Penelitian

Keenam wilayah administratif penelitian akan dikelompokkan menjadi dua yaitu daerah pariwisata dan bukan pariwisata.. Dari segi geografis, dua lokasi penelitian terletak di daerah dengan ketinggian <50m yaitu Subak Intaran dan Subak Basangkasa, sedangkan empat lokasi penelitian lainnya terletak pada ketinggian >300m. Prasarana komunikasi dan transportasi yang tersedia di lokasi penelitian sangat baik. Dari keenam lokasi penelitian hanya satu lokasi yaitu Desa Jungutan dimana Subak Ganggangan berlokasi yang tidak dilayani jaringan telepon, tetapi sekitar 3 km dari lokasi terdapat warung telekomunikasi. Aksesibilitas menuju keenam lokasi penelitian sangat mudah karena tersedianya jalan beraspal yang dapat dilalui kendaraan roda empat setiap saat. Waktu tempuh dari Denpasar menuju lokasi penelitian yang paling jauh (Subak Ganggangan) tidak lebih dari 3 jam.

Penduduk dan Rumah Tangga

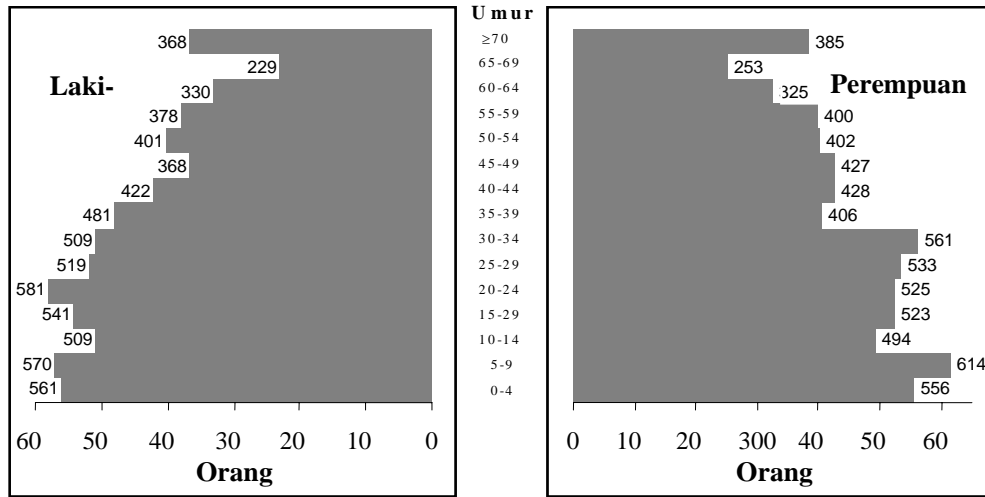
Penduduk di lokasi penelitian yang tergolong daerah pariwisata dan bukan pariwisata serta distribusinya menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2000 ditampilkan pada Gambar 1 dan 2.



Gambar 1. Distribusi penduduk desa-desa lokasi penelitian di daerah pariwisata tahun 2000

Bentuk piramida penduduk di dua kelompok daerah penelitian menunjukkan bentuk berbeda. Pada daerah pariwisata piramida penduduk berbentuk piramida menurun (*declining population pyramid*), sedangkan di daerah bukan pariwisata mendekati bentuk piramida penduduk stasioner (*stationary population pyramid*). Kedua pola distribusi tersebut mencerminkan struktur umur produktif dan beban ketergantungan ringan. Lebih jauh dapat dilihat bahwa di daerah pariwisata proporsi penduduk umur 15-34 tahun terlihat menonjol yang mencerminkan besarnya migrasi neto yang ditarik oleh terbukanya kesempatan kerja pada 20 tahun terakhir. Ini bersesuaian dengan periode perubahan partisipasi angkatan kerja (PAK) dari sektor pertanian ke sektor

nonpertanian. Fakta ini sesuai dengan pernyataan Sudibia (1992) bahwa perkembangan urbanisasi di Bali mengikuti perkembangan sektor pariwisata dan industri kecil kerajinan.



Gambar 2. Distribusi penduduk desa-desa lokasi penelitian di daerah bukan pariwisata tahun 2000

Pada Tabel 1 disajikan beberapa indikator kependudukan. Jumlah penduduk pada desa-desa penelitian di daerah pariwisata (20.036 orang) yaitu 1,5 kali dari jumlah penduduk di desa-desa penelitian di daerah bukan pariwisata (13.599 orang). Banyaknya RT di desa-desa penelitian di daerah pariwisata (7.006 buah), dua kali lipat dari pada jumlah RT di desa-desa penelitian di daerah bukan pariwisata (3.335 buah). Perbedaan angka perbandingan jumlah penduduk dan jumlah RT pada kedua daerah memberikan indikasi bahwa bentuk 'keluarga inti' lebih umum tampak di daerah pariwisata. Itu mungkin merupakan gejala awal terjadinya kerenggangan hubungan kekerabatan akibat semakin majunya masyarakat seperti yang dikatakan Schwimmer (1995). Walaupun budaya Bali masih menunjukkan kelenturan untuk tetap bertahan dari pengaruh negatif dari luar (Mantra, 1990; Ardika, 1991; Astika, 1991 dalam Pitana, 1992), kepariwisataan telah mendorong percepatan perkembangan nilai-nilai progresif yang meliputi nilai ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan individualisme (Pitana, 1992). Besarnya RT juga berhubungan dengan hal itu, dimana besarnya RT di desa-desa penelitian di daerah pariwisata adalah 2,9 yang jauh lebih kecil dari pada di desa-desa penelitian di daerah bukan pariwisata yang mencapai 4,7.

Tabel 1. Penduduk, Kepadatan, dan Rumah Tangga di daerah penelitian tahun 2000

No.	Uraian	Satuan	Pariwisata	Bukan Pariwisata
1.	Penduduk	Orang	20.036	13.599
2.	RT	Buah	7.006	3.351
3.	Besarnya RT	Orang/buah	2,9	4,7
4.	Kepadatan	Orang/km ²	1.783	765
5.	Arable land –man ratio	ha/orang	0,05	0,14

Sumber: BPS (2001^a); BPS (2001^b); BPS (2001^c) BPS (2001^d) BPS (2001^e) BPS (2001^f)

Selanjutnya pada Tabel 1 juga ditunjukkan bahwa, kepadatan penduduk di daerah pariwisata tergolong sangat padat (1.700 orang/km², hampir 2,5 kali lipat dibandingkan daerah bukan pariwisata yang kepadatannya tergolong sedang (765 orang/km²). Kondisi ini menunjukkan kesejajaran dengan angka *arable land-man ratio*. Di daerah pariwisata *arable land-man ratio*-nya sekitar 1/3 dari pada di daerah bukan pariwisata. Indikator mikro tersebut menunjukkan semakin menurunnya peran sektor pertanian untuk menampung angkatan kerja yang sesuai dengan indikator makro bahwa kemajuan pariwisata telah menyebabkan perubahan struktural dalam kesempatan kerja yaitu dari pertanian menjadi industri dan jasa (Bendesa, 1997)

2. Ketenaga-kerjaan dan Pekerjaan

Jika penduduk umur 15-64 tahun dianggap sebagai penduduk usia kerja, dalam arti bahwa dari segi umur mereka dapat memasuki pasar kerja, maka angkatan kerja potensial di kedua daerah dapat dilihat pada Tabel 2. Beban ketergantungan di kedua daerah tergolong ringan (<60), tetapi di daerah pariwisata jauh lebih ringan dibandingkan di daerah bukan pariwisata. Beban ketergantungan di daerah pariwisata adalah sebesar 31 sedangkan di daerah bukan pariwisata sebesar 50.

Tabel 2. Penduduk di daerah penelitian dirinci berdasarkan kelompok umur produktif dan tidak produktif tahun 2000

Kelompok Umur	Daerah Pariwisata			Daerah Bukan Pariwisata		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<15	2.411	2.348	4.759	1.640	1.664	3.304
15-64	7.146	7.310	14.456	4.530	4.530	9.060
>64	395	426	821	597	638	1.235
Jumlah	9.953	10.084	20.036	6.767	6.832	13.599
Beban Ketergantungan	31			50		

Sumber matapencaharian mayoritas penduduk di kedua daerah ini sangat berbeda. Di daerah pariwisata, persentase penduduk yang menggantungkan hidupnya di bidang pertanian hanya 33,57% dari penduduk yang bekerja, sedangkan di daerah bukan pariwisata persentase tersebut mencapai 61,26%. Ini menunjukkan kesempatan kerja luar pertanian di daerah pariwisata jauh lebih terbuka di bandingkan di daerah bukan pariwisata karena berbagai macam usaha yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata tumbuh dan berkembang jauh lebih pesat dibandingkan di daerah bukan pariwisata.

Status Penguasaan Lahan

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa, penyakapan merupakan gejala umum di kedua daerah penelitian. Walaupun perekonomian telah semakin maju dan berkembang di daerah pariwisata, hubungan penggarapan tanah dalam bentuk sewa yang lebih "moderen" belum dapat menggantikan bentuk hubungan penggarapan "tradisional". Jumlah petani penyakap lebih dari separo (51,35%) di daerah pariwisata dan hampir separo (43,97%) di daerah bukan pariwisata.

Proporsi penyakap dengan kekerabatan di daerah pariwisata jauh lebih sedikit dibandingkan di daerah bukan pariwisata. Penyakap dengan kekerabatan di daerah pariwisata hanya sebesar 5,83% sedangkan di daerah bukan pariwisata mencapai 13,53%. Mengacu pada pendapat Scheltema (1985) bahwa bagi hasil sebagai sejenis lembaga "pemeliharaan" sanak keluarga, rupanya pemilik lahan di daerah bukan pariwisata, lebih "suka" lahannya digarap kerabatnya. Gejala ini kembali memberikan tempat bagi pendapat Schwimmer (1995).

Tabel 3. Proporsi petani menurut status penguasaan lahan di daerah pariwisata dan bukan pariwisata dirinci tahun 2000.

No.	Status Penguasaan	Daerah Pariwisata		Daerah Bukan Pariwisata	
		Jumlah Petani	Persentase	Jumlah Petani	Persentase
1	Pemilik-penggarap	203	45,52	232	49,05
2	Penyakap	229	51,35	208	43,97
	a. Tanpa Kekerabatan	203	45,52	144	30,44
	b. Dengan Kekerabatan ^{a)}	26	5,83	64	13,53
3	Pemilik-penyakap	14	3,140	33	6,98
	Jumlah	446	100,00	473	100,00

Sumber: *Klian* (ketua) subak di daerah penelitian; ^{a)}Hasil wawancara.

Tabel 3 juga menunjukkan adanya kecenderungan pemilik lahan di daerah pariwisata enggan mengerjakan sawah miliknya sendiri. Proporsi petani pemilik-penggarap di daerah pariwisata adalah sebanyak 45,52% sedikit lebih kecil dibandingkan di daerah bukan pariwisata yang mencapai 49,05%

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

(1) Umur

Rata-rata umur petani di daerah penelitian tergolong tua baik dilihat dari golongan daerah maupun kelompok petani berdasarkan jenis penguasaan lahan. Petani di daerah pariwisata sedikit lebih tua dari pada di daerah bukan pariwisata. Rata-rata umur petani di daerah pariwisata mencapai 55 tahun dengan rentang 29-77 tahun, sedangkan di daerah bukan pariwisata 49 tahun dengan rentang 30-65 tahun. Struktur umur petani di kedua daerah sangat timpang dimana hanya ada seorang petani yang berumur di bawah 30 tahun. Jika usia kerja dimulai pada umur 15 tahun, maka fakta ini menunjukkan bahwa selama 15 tahun terakhir hampir tidak ada petani "baru" baik di daerah pariwisata maupun bukan pariwisata.

Selanjutnya jika kita golongkan petani umur 15-29 tahun sebagai petani muda, 30-49 tahun sebagai petani usia sedang, dan ≥ 50 tahun sebagai petani usia tua, maka proporsi petani "tua" di daerah pariwisata jauh lebih besar dibandingkan di daerah bukan pariwisata. Proporsi petani yang berumur 50 tahun ke atas di daerah pariwisata mencapai 73,33%, sedangkan di daerah bukan pariwisata sebesar 57,78%. Proporsi petani berumur sedang sebesar 25,25% di daerah pariwisata dan 42,23% di daerah bukan pariwisata, sedangkan proporsi petani muda hampir tidak ada di kedua daerah. Pekerjaan sebagai petani sudah menjadi pekerjaan yang tidak menarik minat anak-anak muda di kedua daerah penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Windia dan Sutjipta (1990) berdasarkan penelitiannya di Desa Celuk Kabupaten Gianyar bahwa persepsi pemuda desa itu tentang pekerjaan petani adalah buruk dengan alasan penghasilan yang diperoleh rendah dan pekerjaan petani tidak nyaman/kotor. Semakin terbuka kesempatan kerja luar pertanian di Bali menimbulkan dampak tersedotnya sumber daya manusia produktif dari sektor pertanian. Gejala ini telah dilaporkan

Bila dilihat berdasarkan penggolongan penguasaan lahan, golongan petani pemilik-penggarap hanya berumur sedikit lebih tua dari pada golongan petani lainnya.

(2) Pendidikan

Tingkat pendidikan petani di kedua daerah penelitian tergolong rendah. Sebanyak 47,78% petani di daerah pariwisata dan 50% di daerah bukan pariwisata tidak pernah mengenyam pendidikan atau tidak sampai lulus sekolah dasar. Jika dilihat dari proporsi petani yang tidak pernah sekolah, ternyata kualitas pendidikan petani di daerah pariwisata lebih rendah dibandingkan petani di daerah bukan pariwisata. Sebanyak 25,56% petani di daerah pariwisata dan 7,78% di daerah bukan pariwisata tidak pernah sekolah. Kondisi serupa juga dilaporkan oleh Kamana (1993) dimana pada daerah yang lebih maju perekonomiannya ternyata tingkat pendidikan formal petani lebih rendah.

Jika dikaitkan dengan umur petani, ada kesesuaian antara proporsi petani berdasarkan umur dan tingkat pendidikan. Lebih besar proporsi petani tua lebih buruk tingkat pendidikannya, sebaliknya lebih kecil proporsi petani tua lebih baik tingkat pendidikannya. Kecenderungan pertama tampak di daerah pariwisata, sedangkan yang kedua tampak di daerah bukan pariwisata. Rupanya, para petani berusia tua itulah yang tidak pernah mengenyam pendidikan.

Selanjutnya, pendidikan petani pemilik penggarap sedikit lebih baik dibandingkan dua kelompok petani lainnya. Hanya sebanyak 33,85% petani pemilik-penggarap yang tidak sampai menamatkan pendidikan formal, sedangkan petani penyakap dengan kekerabatan dan tanpa kekerabatan berturut-turut sebanyak 49,09% dan 65%.

(3) Jumlah Anggota Keluarga

Rumah tangga petani di daerah pariwisata sedikit lebih besar dibandingkan rumah tangga petani di daerah bukan pariwisata. Besar rumah tangga di daerah pariwisata adalah 4,65 sedangkan di daerah bukan pariwisata sebesar 4,13. Jika dibandingkan dengan rumah tangga umumnya di daerah pariwisata yang besarnya hanya 2,9 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1, besar rumah tangga petani di daerah ini jauh lebih besar. Data ini memberikan indikasi, bahwa petani di daerah pariwisata ternyata tidak mengikuti pola umum rumah tangga di daerah pariwisata yang ukurannya kecil, mereka cenderung membentuk *extended family* karena tekanan harga lahan yang sangat mahal. Sedangkan, besarnya keluarga petani dengan status pemilik-penggarap, penyakap dengan kekerabatan, dan penyakap tanpa kekerabatan berturut-turut adalah 4,23, 4,25, dan 4,70.

(4) Penguasaan Lahan

Rata-rata luas penguasaan lahan petani di daerah pariwisata sedikit lebih sempit dari pada petani di daerah bukan pariwisata. Lahan yang dikuasai petani di daerah pariwisata seluas 0,55 sedangkan di daerah bukan pariwisata seluas 0,66 ha. Jenis lahan yang dikuasai petani di daerah pariwisata sebagian besar berupa lahan sawah yaitu seluas 0,39 ha (71,50%) dan pekarangan seluas 0,16 ha (28,30%). Sedangkan jenis lahan yang dikuasai petani di daerah bukan pariwisata bukan hanya sawah dan

pekarangan yang masing-masing luasnya 0,43 ha (65,75%) dan 0,13 ha (20,18%) tetapi juga kebun/tegalan yang luasnya 0,08 ha (12,17%).

Menarik untuk mengamati “sumber” lahan sawah yang dikuasai petani pada kedua golongan daerah penelitian. Sebanyak 2/3 bagian lahan sawah yang dikuasai petani di daerah pariwisata adalah milik orang lain, sedangkan di daerah bukan pariwisata mencapai 3/4 bagian. Rupanya, petani di daerah pariwisata kurang berminat untuk memperluas sawah garapannya dengan cara mengerjakan lahan orang lain dibandingkan petani di daerah bukan pariwisata. Sementara itu, petani pemilik-penggarap kelihatannya menggarap lahan sawah lebih sempit dibandingkan dua golongan petani lainnya. Petani pemilik-penggarap, penyakap dengan kekerabatan, dan penyakap tanpa kekerabatan berturut-turut adalah 0,36 ha, 0,48 ha, dan 0,40 ha. Ini dapat dipahami, karena sebagian hasil padi yang diperoleh penyakap dengan cara bagi-hasil “diambil” oleh pemilik lahan. Dengan demikian, petani penyakap berusaha meningkatkan luas lahan garapannya sehingga bisa memperoleh hasil padi yang “lebih banyak” untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga mereka

(5) Kuosien Bagi Hasil

Menurut Raka (1955), kuosien bagi hasil yaitu perbandingan hasil yang diterima pemilik dan penggarap yang secara “tradisional” berlaku di Bali sampai saat tulisannya diterbitkan adalah: $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$ (*nandu*), $\frac{3}{5} - \frac{2}{5}$ (*nelon*), $\frac{2}{3} - \frac{1}{3}$ (*ngapit*), $\frac{3}{4} - \frac{1}{4}$ (*merapat*), dan $\frac{4}{5} - \frac{1}{5}$ (tanpa istilah). Saat ini, kuosien bagi hasil yang disebut terakhir sudah tidak tampak di kedua daerah penelitian, tetapi sebaliknya muncul kuosien bagi hasil yang “baru” yaitu $\frac{1}{3} - \frac{2}{3}$ yang berlaku di daerah pariwisata dimana $\frac{1}{3}$ bagian untuk pemilik dan $\frac{2}{3}$ bagian untuk penyakap.

Kuosien bagi hasil pada sistem penyakapan lahan sawah di daerah pariwisata lebih baik dibandingkan di daerah bukan pariwisata. Seperti yang terlihat pada Tabel 4, sebagian besar (63,64%) penyakap padi sawah di daerah pariwisata menerima bagian hasil $\frac{2}{3}$, sedangkan sebagian besar (38,33%) penyakap di daerah bukan pariwisata menerima bagian hasil $\frac{2}{5}$. Kuosien bagi hasil yang paling buruk bagi penyakap yaitu sistem “*nucuin*” atau *merapat*, dimana penyakap hanya menerima $\frac{1}{4}$ bagian hasil sudah tidak tampak di daerah pariwisata, sedangkan di daerah bukan pariwisata masih menimpa 23,33% petani penyakap.

Jika bagian hasil yang diterima penyakap digunakan sebagai tolak ukur, tampaknya, kemajuan perekonomian di daerah pariwisata telah dapat mengangkat posisi petani penyakap. Semakin tua umur petani dan keengganan anak muda untuk bekerja sebagai petani karena pekerjaan luar pertanian yang lebih baik menyebabkan “kelangkaan” penyakap di daerah ini. Semakin langka penyakap semakin tinggi “harga” penyakap.

Tabel 4. Bagian hasil yang diterima dan biaya yang ditanggung penyakap padi sawah di daerah pariwisata dan bukan pariwisata tahun 2002

Uraian	Daerah Pariwisata						Daerah Bukan Pariwisata					
	Penyakap dengan kekerabatan		Penyakap tanpa kekerabatan		Keseluruhan		Penyakap dgn kekerabatan		Penyakap tanpa kekerabatan		Keseluruhan	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
2/3 dan 1	15	60	20	66,67	35	63,64	0	-	0	-	0	-
1/2 dan 1/2	6	24	2	6,67	8	14,55	9	30,00	5	16,67	14	23,33
2/5 dan 2/5	0	0	5	16,67	5	9,09	11	36,67	12	40,00	23	38,33
1/3 dan 0	3	12	0	-	3	5,45	0	-	0	-	0	-
1/3 dan 1/3	1	4	3	10,00	4	7,27	5	16,67	4	13,33	9	15,00
1/4 dan 0	0	0	0	-	0	-	5	16,67	9	30,00	14	23,33
Jumlah	25	100	30	100	55	100	30	100	30	100	60	100

“Harga” penyakap tidak hanya ditentukan oleh kemajuan ekonomi suatu daerah tetapi juga hubungan kekerabatan antara pemilik dan penyakap. Pada Tabel 5 dapat dilihat, bahwa lebih banyak penyakap dengan kekerabatan (54,55 %) mengerjakan lahan sakapan dengan kuosien bagi hasil yang lebih baik yaitu $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{2}$ dibanding penyakap tanpa kekerabatan (45,00%). Itu merupakan salah satu petunjuk bahwa sebagai pengejawantahan rasa tanggung jawab memelihara sanak keluarga, pemilik lahan di daerah bukan pariwisata lebih suka lahannya digarap oleh kerabatnya.

Tabel 5. Bagian hasil yang diterima dan biaya yang ditanggung penyakap dengan kekerabatan dan tanpa kekerabatan tahun 2002

No.	Uraian	Penyakap dengan kekerabatan		Penyakap tanpa kekerabatan	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1.	2/3 dan 1	15	27,27	20	33,33
2.	1/2 dan 1/2	15	27,27	7	11,67
	<u>Sub Jumlah</u>	30	54,55	27	45,00
3.	2/5 dan 2/5	11	20,00	17	28,33
4.	1/3 dan 0	3	5,45	0	-
5.	1/3 dan 1/3	6	10,91	7	11,67
6.	1/4 dan 0	5	9,09	9	15,00
	<u>Sub Jumlah</u>	25	45,45	33	55,00
	<u>Jumlah</u>	55	100,00	60	100,00

(6) Pekerjaan Sampingan

Petani yang mempunyai pekerjaan sampingan di daerah pariwisata jauh lebih sedikit dibandingkan petani di daerah bukan pariwisata. Proporsi petani di daerah pariwisata yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan mencapai 56,67%, sedangkan di daerah bukan pariwisata hanya 32,22%. Mungkin kenyataan ini berkaitan dengan usia tua dan pendidikan yang rendah petani di daerah pariwisata. Itu sejajar dengan temuan Kamana (1993) bahwa golongan petani yang tidak terlibat sama sekali dengan pekerjaan nonpertanian adalah golongan petani bertanah luas dan tua.

Usia lanjut dan pendidikan yang rendah membatasi kemungkinan petani mengambil pekerjaan-pekerjaan luar pertanian yang "diinduce" oleh kemajuan pariwisata yang umumnya memerlukan keterampilan lebih tinggi. Dari 43,33% petani yang mempunyai pekerjaan sampingan di daerah pariwisata, sebanyak 40,00% bekerja di luar sektor pertanian, sedangkan dari 67,77% petani yang mempunyai pekerjaan sampingan di daerah bukan pariwisata hanya 33,33% yang bekerja di luar sektor pertanian.

Ada kecenderungan bahwa golongan petani penyakap "lebih semangat" mengambil pekerjaan sampingan dibandingkan mereka yang tergolong pemilik-penggarap. Proporsi petani pemilik-penggarap, penyakap dengan kekerabatan, dan penyakap tanpa kekerabatan yang tidak memiliki pekerjaan sampingan berturut-turut adalah 47%, 69%, 38,18%, dan 46,67%. Fakta ini menunjukkan suatu sifat alami "mekanisme mempertahankan diri" melalui pola nafkah berganda bagi petani tanpa lahan (Sajogjo, 1978 dalam Perhepi, 1982).

(7) Pendapatan Rumah Tangga

Sesuai dengan perkiraan, pendapatan RT petani di daerah pariwisata lebih tinggi dibandingkan RT petani di daerah bukan pariwisata. Pendapatan RT petani di daerah pariwisata sekitar 13 juta rupiah sedangkan RT petani di daerah bukan pariwisata sekitar 7,5 juta rupiah. Sumbangan sumber pendapat RT petani di daerah pariwisata yang berasal dari pertanian jauh lebih kecil dibandingkan RT petani di daerah bukan pariwisata. RT petani di daerah pariwisata memperoleh pendapatan dari kelompok pekerjaan pertanian hanya 20,60%, sedangkan RT petani di daerah bukan pariwisata mencapai 69,55% dari total pendapatan masing-masing.

Dilihat dari status penguasaan lahan, pendapatan total rumah tangga petani pemilik penggarap sedikit lebih tinggi dibandingkan penyakap dengan kekerabatan dan penyakap tanpa kekerabatan sedangkan pendapatan total dua golongan petani yang disebut belakangan hampir sama. Pendapatan total rumah tangga petani pemilik-penggarap, penyakap dengan kekerabatan, dan penyakap tanpa kekerabatan berturut-turut adalah 11,3 juta rupiah, 9,8 juta rupiah, dan 10,1 juta rupiah.

Selanjutnya, dapat dilihat bahwa sumbangan sumber pendapatan dari sektor pertanian pada rumah tangga petani pemilik penggarap lebih tinggi dibandingkan pada rumah tangga penyakap dengan kekerabatan dan penyakap tanpa kekerabatan. Sedangkan sumbangan sumber pendapatan dari sektor pertanian pada dua golongan petani yang disebut belakangan hampir sama. Sumbangan sumber pendapatan dari kelompok pekerjaan pertanian terhadap pendapatan total rumah tangga pemilik-penggarap, penyakap dengan kekerabatan, dan penyakap tanpa kekerabatan berturut-turut adalah: 45,56%, 37,61%, 31,64%.

Penggunaan Tenaga Kerja

Sistem penguasaan lahan dan kemajuan pariwisata tidak memberikan pengaruh berbeda terhadap penggunaan tenaga kerja (Tabel 6) karena pemilik dapat mengontrol pekerjaan penyakap. Sebagian besar penyakap pada kedua sistem bagi hasil baik

di daerah pariwisata maupun bukan pariwisata bertempat tinggal pada desa yang sama dengan pemilik, yang berarti hampir tidak ada sistem bagi hasil yang ditandai sifat *absentee-landowner*. Pada kondisi dimana pemilik dan penggarap bertempat tinggal pada lokasi yang berdekatan maka pemilik akan lebih mudah mengontrol penyakap dalam hubungannya dengan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan usahatani. Dengan demikian, pemilik akan bisa menetapkan penggunaan tenaga kerja pada usahatani sesuai yang dikehendakinya. Ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Cheung (1969) bahwa penggunaan tenaga kerja optimal pada bagi hasil bisa dicapai jika pemilik lahan mampu menetapkan tingkat penggunaan input. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Yang (1965), yang menyatakan bahwa penyebab-penyebab insentif rendah bagi tuan tanah dan penyakap disebabkan oleh *absentee-landowner*. Kondisi bagi hasil di Bali, baik di daerah pariwisata maupun bukan pariwisata, dengan demikian mengikuti model “*enforceable contract*” (model Cheung).

Tabel 6. Pengaruh sistem penguasaan lahan terhadap penggunaan tenaga kerja pada usahatani padi di daerah pariwisata dan bukan pariwisata

Daerah	Sistem Penguasaan Lahan		
	PP	BTK	BK
	HOK perha		
Pariwisata	939,62	910,41	959,79
Bukan Pariwisata	879,73	869,09	965,70

Sementara itu, kemajuan pariwisata tidak berpengaruh terhadap penggunaan tenaga kerja usahatani padi sawah karena ternyata sebagian besar petani di daerah pariwisata bukan merupakan “pelaku” dalam aktivitas ekonomi luar pertanian yang didorong oleh kemajuan kepariwisataan. Dengan demikian “gangguan” yang disebabkan oleh kesibukan pekerjaan luar pertanian tidak menyebabkan berkurangnya “perhatian” terhadap pekerjaan usahatani padi sawah di daerah pariwisata.

Alokasi Tenaga Kerja Rumah Tangga Petani

Alokasi tenaga kerja rumah tangga petani yang dianalisis dalam penelitian ini adalah alokasi untuk pekerjaan luar pertanian. Pengaruh sistem penguasaan lahan dan kemajuan pariwisata tertera pada Tabel 7. Proporsi penggunaan tenaga kerja rumah tangga petani untuk pekerjaan luar usahatani padi sangat nyata lebih tinggi di daerah pariwisata dibandingkan di daerah bukan pariwisata yaitu berturut-turut 67% dan 45%.

Tabel 7. Pengaruh sistem penguasaan lahan terhadap alokasi tenaga kerja untuk pekerjaan luar usahatani di daerah pariwisata dan bukan pariwisata

Daerah	Sistem Penguasaan Lahan			
	PP	BTK	BK	Rata-rata
	%			
Pariwisata	65	70	67	67 a
Bukan Pariwisata	52	48	34	45 b

Keterangan: Huruf yang tidak sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada P05.

Kemajuan pariwisata memberikan pengaruh terhadap alokasi tenaga kerja rumah tangga petani untuk pekerjaan luar pertanian karena menurut Pitana dan Sudama (1992) di daerah pariwisata berbagai jenis lapangan pekerjaan luar pertanian yang tersedia bagi angkatan kerja semakin terbuka.

Biaya Sarana Produksi

Pada Tabel 8 ditunjukkan bahwa, sistem penguasaan lahan tidak menunjukkan pengaruh terhadap biaya saprodi. Itu tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan Marshall dalam teorinya yang disebabkan oleh dua hal: 1) Ketiga kelompok petani ini berproduksi dibawah organisasi subak yang proses interaksi antar anggotanya sangat intensif sehingga informasi mengenai teknik produksi sangat merata, pada organisasi subak walaupun penyakap bukan pemilik lahan masuk sebagai anggota; 2) Pada sistem bagi hasil yang berlaku yang menyangkut beban biaya yang ditanggung kedua pihak (lihat Tabel 5), hampir semua cara pembagian penanggung biaya melibatkan pemilik kecuali pada pembagian hasil 2/3 dan biaya 1 untuk penyakap. Pada pengecualian itu pun ada semacam jaminan bahwa penyakap akan mengeluarkan biaya sesuai dengan kebutuhan karena penyakap telah mendapatkan bagian untuk biaya saprodi sebesar 1/3 bagian hasil. Alasan kedua merupakan kondisi yang tidak

sesuai dengan asumsi yang digunakan oleh Marshall dimana pada teorinya diasumsikan pemilik hanya ikut dalam pembagian hasil tetapi tidak terlibat dalam penanggungungan biaya input.

Tabel 8. Pengaruh sistem penguasaan lahan terhadap biaya saprodi usahatani padi sawah di daerah pariwisata dan bukan pariwisata

Daerah	Sistem Penguasaan Lahan			
	PP	BK	BTK	Rata-rata
	Rp per ha			
Pariwisata	743.335,46	639.315,06	675.911,40	686.187,3 a
Bukan Pariwisata	575.678,14	611.221,67	547.298,00	578.065,90 b

Keterangan: Huruf yang tidak sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada P05.

Sebaliknya, kemajuan pariwisata menunjukkan pengaruh terhadap biaya saprodi. Petani di daerah pariwisata mengeluarkan biaya untuk saprodi per ha sebesar Rp 686.187,29 lebih tinggi dari pada di daerah bukan pariwisata yang hanya Rp 578.065,94. Kemajuan pariwisata menunjukkan pengaruh terhadap pengeluaran untuk sarana produksi karena: 1) petani di daerah pariwisata lebih mampu membeli *input* dibandingkan di daerah bukan pariwisata karena kelompok petani yang disebut pertama lebih "kaya" dari pada yang disebut belakangan; 2) Petani di daerah pariwisata berhadapan dengan tantangan yang lebih besar menyangkut upah tenaga kerja yang lebih mahal (Pitana dan Sudarma, 1992) sehingga untuk menekan ongkos tenaga kerja, mereka banyak menggunakan herbisida untuk mengatasi gulma.

Produktivitas Lahan

Pada Tabel 9 tampak bahwa terdapat perbedaan pengaruh nyata antara sistem pemilik-penggarap dengan bagi hasil tanpa kekerabatan terhadap produktivitas lahan usahatani padi. Tetapi tidak terlihat adanya pengaruh nyata antara sistem bagi hasil dengan kekerabatan dengan pemilik-penggarap dan juga dengan bagi hasil tanpa kekerabatan. Rata-rata produktivitas lahan usahatani padi yang dikerjakan dengan sistem pemilik-penggarap, bagi hasil tanpa kekerabatan, dan bagi hasil dengan kekerabatan berturut-turut adalah 42,39 ku/ha, 37,97 ku/ha, dan 40,50 ku/ha.

Sulit untuk menjelaskan gejala ini bila dikaitkan dengan penggunaan sarana produksi yang jumlahnya sama pada ketiga kelompok sistem penguasaan lahan. Tetapi bila diteliti lebih jauh, ternyata kualitas sarana produksi yang digunakan pemilik-penggarap dan penyakap dengan kekerabatan sedikit lebih baik dibandingkan penyakap tanpa kekerabatan. Proporsi pemilik-penggarap yang menggunakan pupuk lengkap, pupuk kandang dan zat pengatur tumbuh lebih banyak dibandingkan penyakap tanpa kekerabatan. Penggunaan benih berlabel lebih sering dilakukan oleh pemilik-penggarap dan penyakap dengan kekerabatan dibanding dengan penyakap tanpa kekerabatan. Rupanya, ada kecenderungan bahwa terdapat rasa memiliki yang sama pada dua kelompok petani yang disebut pertama dan lebih tinggi dari pada kelompok petani yang disebut terakhir, dengan demikian lebih banyak upaya-upaya dilakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan. Ini sesuai dengan pendapat Sadoulet *et. al* (1997) yang menyatakan bahwa hubungan kekerabatan menjamin kerjasama yang baik antara penyakap dan pemilik, selanjutnya, Hermes (1907 dalam Scheltema, 1985) menyatakan bagi hasil yang baik ditandai adanya kerjasama yang baik antara pemilik dan penyakap.

Tabel 9. Pengaruh sistem penguasaan lahan terhadap produktivitas lahan pada usahatani padi sawah di daerah pariwisata dan bukan pariwisata

Daerah	Sistem Penguasaan Lahan		
	PP	BTK	BK
	ku per ha		
Pariwisata	45,34	38,55	41,59
Bukan Pariwisata	39,45	37,40	39,42
Rata-rata	42,39A	37,97B	40,50AB

Keterangan: Huruf yang tidak sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada P05

Pendapatan Kerja Petani

Sistem penguasaan lahan berpengaruh terhadap pendapatan kerja petani, sedangkan kemajuan pariwisata tidak. Pada Tabel 10 tampak bahwa rata-rata pendapatan kerja petani pada usahatani yang dikerjakan pemilik-penggarap (Rp 1.464.663,41 per ha) nyata lebih tinggi dari pada penyakap tanpa kekerabatan (-Rp 838.707,28 per ha) dan penyakap dengan kekerabatan (-Rp 452.726,02 per ha). Sedangkan antara penyakap tanpa kekerabatan dan penyakap dengan kekerabatan tidak terdapat perbedaan yang nyata. Perbedaan pengaruh tersebut bukan hanya disebabkan oleh perbedaan produktivitas lahan usahatani padi yang dikerjakan pemilik-penggarap, tetapi juga oleh terbaginya penerimaan usahatani padi yang dikerjakan penyakap. Selanjutnya, nilai negatif pendapatan kerja petani pada usahatani kecil, khususnya penyakap, merupakan gambaran umum seperti sinyallemen yang dikemukakan oleh Soeharjo dan Patong (1973).

Tabel. 10. Pengaruh sistem penguasaan lahan terhadap pendapatan kerja petani pada usahatani padi sawah di daerah pariwisata dan bukan pariwisata

Daerah	Sistem Penguasaan Lahan		
	PP	BTK	BK
	Rp per ha		
Pariwisata	1.022.637,91	-485.852,22	-355.112,00
Bukan Pariwisata	1.906.688,90	-1.191.562,34	-550.340,00
Rata-rata	1.464.663,41A	-838.707,28B	-452.726,00B

Keterangan: Huruf yang tidak sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada P05

Pendapatan Kerja Keluarga

Walaupun produktivitas lahan usahatani padi di daerah pariwisata dan bukan pariwisata tidak berbeda nyata, seperti yang ditampilkan pada Tabel 11, rata-rata pendapatan kerja keluarga usahatani padi di daerah pariwisata (Rp 2.127.269,09 per ha) lebih tinggi di dibandingkan di daerah bukan pariwisata (Rp 1.472.636,18 per ha). Perbedaan ini disebabkan oleh tingkat upah di daerah pariwisata (Rp 35.000,00 per hari) jauh lebih tinggi dibandingkan di daerah bukan pariwisata (Rp 25.000,00 per hari). Dengan demikian transfer pengeluaran dalam bentuk "upah tenaga kerja keluarga" ke dalam pendapatan kerja keluarga di daerah pariwisata jauh lebih tinggi dari pada di daerah bukan pariwisata. Nilai "transfer" tersebut yang merupakan upah yang seharusnya dibayar kepada tenaga kerja keluarga yang terlibat dalam usahatani adalah sebesar Rp 2.066.711,06 di daerah pariwisata dan Rp 1.417.707,47 di daerah bukan pariwisata.

Tabel 11 juga menampilkan pengaruh sistem penguasaan lahan terhadap pendapatan kerja keluarga. Rata-rata pendapatan keluarga pada usahatani padi yang dikerjakan pemilik-penggarap (Rp 3.249.328,82 per ha) nyata lebih tinggi dibandingkan usahatani padi yang dikerjakan penyakap tanpa kekerabatan (Rp 980.458,98 per ha) dan penyakap dengan kekerabatan (Rp 1.170.070,11 per ha). Sama seperti pada ukuran pendapatan kerja petani, perbedaan yang sangat besar antara pendapatan kerja keluarga usahatani padi yang dikerjakan pemilik-penggarap dan kedua golongan penyakap disebabkan oleh penerimaan yang terbagi sebagai "sewa" lahan.

Tabel. 11. Pengaruh sistem penguasaan lahan terhadap pendapatan kerja keluarga pada usahatani padi sawah di daerah pariwisata dan bukan pariwisata

Daerah	Sistem Penguasaan Lahan			
	PP	BTK	BK	Rata-rata
	Rp per ha			
Pariwisata	3.325.156,60	1.488.219,97	1.568.43,71	2.127.269,09a
Bukan Pariwisata	3.173.501,05	472.697,98	771.709,51	1.472.636,18b
Rata-rata	3.249.328,82A	980.458,98B	1.170.070,11B	

Keterangan: Huruf yang tidak sama (huruf kecil pada kolom terakhir dan huruf besar pada baris terakhir) menunjukkan perbedaan yang nyata pada P05

Pendapatan Kerja Keluarga untuk Setiap Hari Orang Kerja (HOK)

Rata-rata pendapatan tenaga kerja keluarga per HOK di daerah pariwisata (Rp 29.403,46 nyata lebih tinggi dibandingkan di daerah bukan pariwisata (Rp19.539,71) (Tabel12). Ini menunjukkan petani di daerah pariwisata bekerja lebih efisien dibandingkan petani di daerah bukan pariwisata. Fenomena ini merupakan konsekuensi logis dari semakin meningkatnya tingkat upah di daerah pariwisata. Karena tingkat upah yang semakin tinggi, petani di daerah pariwisata berupaya mengimplementasikan teknik budidaya yang hemat tenaga kerja. Indikasi terjadinya proses penghematan penggunaan tenaga kerja tersebut dapat dilihat dari penggunaan herbisida dan traktor sebagai pengganti tenaga kerja untuk menangani gulma dan mengolah tanah. Proporsi petani di daerah pariwisata yang mengaplikasikan herbisida dan menggunakan traktor berturut-turut 83,46% dan 91,14% jauh lebih banyak dari pada di daerah bukan pariwisata yang jumlahnya berturut-turut sebanyak 27,28% dan 22,22%.

Selanjutnya, Tabel 12 menampilkan penjabaran pengaruh sistem penguasaan lahan terhadap pendapatan kerja keluarga per HOK. Rata-rata pendapatan kerja keluarga per HOK pada usahatani padi yang dikerjakan pemilik-penggarap (Rp 41.786,58) nyata lebih tinggi dibandingkan yang dikerjakan penyakap tanpa kekerabatan (Rp 14.837,48) dan juga penyakap dengan kekerabatan (Rp 16.790,70).

Tabel 12. Pengaruh sistem penguasaan lahan terhadap pendapatan kerja keluarga per HOK pada usahatani padi sawah di daerah pariwisata dan bukan pariwisata

Daerah	Sistem Penguasaan Lahan			
	PP	BTK	BK	Rata-rata
	Rp per ha			
Pariwisata	44.636,02	20.885,90	22.688,46	29.403,46a
Bukan Pariwisata	38.937,14	8.789,06	10.892,93	19.539,71b
Rata-rata	41.786,58A	14.837,48B	16.790,69B	

Keterangan: Huruf yang tidak sama (huruf kecil pada kolom terakhir dan huruf besar pada baris terakhir) menunjukkan perbedaan yang nyata pada P05

Preferensi Petani terhadap Sistem Sewa-tunai

Data tentang petani yang lahan garapannya berstatus sewa-tunai sangat sulit diperoleh baik pada subak-subak yang terletak di daerah pariwisata maupun di daerah bukan pariwisata. Semua *kelian* (ketua) subak yang tercapuk di dalam daerah penelitian ini tidak mempunyai data tersebut. Oleh karena itu, preferensi petani terhadap sistem sewa-tunai tidak bisa diuji dengan data numerik, sebagai gantinya digunakan data kualitatif. Indikator yang digunakan untuk mengetahui preferensi petani terhadap sistem sewa-tunai adalah: (1) proporsi responden yang mengetahui adanya pemilik lahan yang ‘memberikan’ atau menawarkan lahannya kepada orang lain dengan sistem sewa-tunai dan/atau petani yang ‘mendapatkan’, atau ‘ingin mendapatkan’ lahan dari orang lain dengan sistem sewa-tunai; (2) respon responden yang berkeinginan memperluas lahan garapan terhadap dua pilihan sistem: sewa-tunai atau bagi hasil.

Pada tabel 13 tampak bahwa ada kecenderungan preferensi pemilik lahan maupun petani terhadap sistem sewa-tunai lebih tinggi di daerah pariwisata dibandingkan di daerah bukan pariwisata. Proporsi responden yang menyatakan adanya pemilik lahan yang menyewakan atau ingin menyewakan lahannya di daerah pariwisata (8,89%) lebih banyak dari pada di daerah bukan pariwisata (6,67%). Serupa dengan itu, proporsi responden yang menyatakan adanya petani yang menyewa atau ingin menyewa lahan di daerah pariwisata (13,33%) lebih banyak dibandingkan di daerah bukan pariwisata (12,22%).

Disadari bahwa indikasi yang ditunjukkan pada Tabel 13 sangat lemah karena ada kemungkinan pemilik lahan atau petani yang dinyatakan oleh beberapa responden memilih atau berkeinginan memilih sistem sewa-tunai adalah orang yang sama. Oleh karena itu data yang ditunjukkan pada Tabel 13 dikonfirmasi dengan sikap responden yang berkeinginan memperluas lahan garapannya. Ada sebanyak 17,46% responden di daerah pariwisata dan 22% di daerah bukan pariwisata yang berkeinginan memperluas lahan garapan. Dari 17,46% responden di daerah pariwisata yang berkeinginan memperluas lahan garapannya, sebanyak 86,67% memilih sistem sewa-tunai sedangkan sisanya (13,33%) memilih sistem bagi hasil. Sebaliknya, dari 22% responden di daerah bukan pariwisata yang berkeinginan memperluas lahan garapannya, sebanyak 95,83% ingin memilih sistem bagi hasil sedangkan sisanya (4,17%) memilih sistem sewa-tunai (lihat Tabel 14). Rupanya, apa yang dikatakan Basu (1992 dalam Roy dan Safers, 2000) tidak salah bahwa pada daerah-daerah yang lebih “miskin” bagi hasil lebih umum terlihat karena kemiskinan menjadikan orang enggan risiko (Scott, 1993).

Tabel 13. Jumlah dan proporsi responden yang menyatakan adanya pemilik lahan yang menyewakan lahannya atau ingin menyewakan lahannya dan petani yang menyewa atau ingin menyewa lahan di daerah pariwisata dan bukan pariwisata

Responden	Pemilik lahan		Petani	
	Orang	Persen ^{a)}	Orang	Persen ^{a)}
Daerah Pariwisata				
Pemilik-penggarap	6	17,14	6	17,14
Penyakap tnp Kekerabatan	2	6,67	5	16,67
Penyakap dengan kekerabatan	0	-	1	4,00
Keseluruhan	8	8,89	12	13,33
Daerah Bukan Pariwisata				
Pemilik-penggarap	2	6,67	2	6,67
Penyakap tnp Kekerabatan	2	6,67	5	16,67
Penyakap dgn kekerabatan	2	6,67	4	13,33
Keseluruhan	6	6,67	11	12,22

Keterangan: Persen terhadap jumlah responden pada masing-masing kategori

Responden yang memilih sistem sewa-tunai membenarkan alasan bahwa dengan sistem sewa tunai mereka lebih bebas mengelola sehingga pendapatan usahatani mereka dapat meningkat. Sedangkan responden yang memilih sistem bagi hasil karena mereka bisa memperoleh lahan garapan tanpa harus menyediakan uang tunai yang tidak mereka miliki (95% responden) dan memperkecil risiko (5% responden). Keterbatasan keuangan para petani merupakan alasan utama mereka memilih sistem bagi hasil (Shetty, 1989; Ray dan Singh, 2000).

Tabel 14. Proporsi responden yang berkeinginan memperluas lahan garapannya berdasarkan sistem penguasaan lahan yang dipilih

Responden	Sewa Tunai		Bagi hasil	
	Orang	Persen	Orang	Persen
Daerah Pariwisata				
Pemilik-penggarap	5	100,00	0	-
Penyakap tnp Kekerabatan	6	60,00	4	40
Penyakap dengan kekerabatan	1	100,00	0	-
Keseluruhan	12	86,67	4	13,33
Daerah Bukan Pariwisata				
Pemilik-penggarap	0	-	5	100,00
Penyakap tnp Kekerabatan	0	-	8	100,00
Penyakap dengan kekerabatan	1	12,50	7	87,50
Keseluruhan	1	4,17	20	95,83

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan telaahan hasil penelitian mengenai penggunaan tenaga kerja dan kinerja usahatani yang dikerjakan pemilik-penggarap, penyakap tanpa kekerabatan, dan penyakap dengan kekerabatan di daerah pariwisata dan bukan pariwisata, ditemukan beberapa hal sebagaimana termuat pada butir-butir di bawah.

- (1) Penggunaan tenaga kerja pada usahatani padi sawah tidak bergantung pada kemajuan pariwisata dan tiga sistem penguasaan lahan, sedangkan alokasi tenaga kerja keluarga petani untuk kerja luar pertanian sangat dipengaruhi oleh kemajuan pariwisata. Alokasi tenaga kerja keluarga petani untuk kerja luar pertanian di daerah pariwisata lebih tinggi dari pada bukan pariwisata

- (2) Intensitas pengusahaan yang tercermin dari curahan biaya sarana produksi dan total pada usahatani padi sawah sama besar baik pada usahatani yang dikerjakan pemilik-penggarap, penyakap tanpa kekerabatan, dan penyakap dengan kekerabatan, tetapi lebih rendah di daerah pariwisata dibandingkan bukan pariwisata.
- (3) Kinerja usahatani padi sawah yang tercermin dari produktivitas lahan sama baiknya antara usahatani yang terletak di daerah pariwisata dan bukan pariwisata dan juga antara usahatani yang dikerjakan pemilik-penggarap dan penyakap dengan kekerabatan, sedangkan usahatani yang dikerjakan pemilik penggarap lebih baik dari pada yang dikerjakan penyakap tanpa kekerabatan.
- (4) Kinerja usahatani padi sawah yang tercermin dalam bentuk pendapatan kerja petani sama baiknya antara usahatani yang terletak di daerah pariwisata dan bukan pariwisata, sedangkan usahatani yang dikerjakan pemilik-penggarap lebih baik dibandingkan yang dikerjakan penyakap dengan kekerabatan maupun yang dikerjakan penyakap tanpa kekerabatan.
- (5) Kinerja usahatani padi sawah yang tercermin dalam bentuk pendapatan kerja keluarga dan pendapatan kerja per HOK lebih baik di daerah pariwisata dibandingkan bukan pariwisata. Serupa dengan itu, kinerja usahatani yang diukur dengan dua ukuran di atas pada usahatani yang dikerjakan pemilik-penggarap lebih baik dibandingkan yang dikerjakan penyakap tanpa kekerabatan maupun dengan kekerabatan.
- (6) Preferensi petani yang ingin memperluas lahan garapannya terhadap bentuk penguasaan lahan menunjukkan indikasi bahwa petani di daerah pariwisata cenderung memilih bentuk sewa-tunai, sebaliknya di daerah bukan pariwisata cenderung memilih bagi hasil.

Selain temuan yang berkaitan langsung dengan masalah yang teridentifikasi, ditemukan pula beberapa informasi penting yang berguna dalam merumuskan kebijakan pembangunan pertanian seperti yang terkandung dalam butir-butir di bawah.

- (a) Posisi tawar penyakap berhadapan dengan pemilik lahan yang tercermin dalam bentuk kuosien bagi hasil bertambah baik dengan semakin majunya perekonomian suatu daerah. Kuosien bagi hasil di daerah pariwisata lebih baik dari pada di daerah bukan pariwisata.
- (b) Perkembangan pariwisata di Bali menyebabkan sumber daya manusia yang teralokasi di sektor pertanian adalah sumber daya manusia berkualitas rendah yang tercermin dari umur dan tingkat pendidikan formal.
- (c) Tingkat pendidikan rendah dan umur lanjut menyebabkan petani di daerah pariwisata tidak mampu memanfaatkan terbukanya kesempatan kerja luar pertanian di daerah pariwisata.

Berdasarkan butir-butir temuan di atas dapat disimpulkan seperti di bawah ini.

Pada tingkat perkembangan masyarakat di Bali sampai saat ini, baik di daerah pariwisata maupun bukan pariwisata, penggunaan input yang mudah dikontrol oleh pemilik pada usahatani yang dikelola dalam bentuk bagi hasil tanpa kekerabatan dan dengan kekerabatan, seperti tenaga kerja, mengikuti model *enforceable contract* (model Cheung) sehingga penggunaan input optimum. Walaupun demikian, kinerja usahatani yang tercermin dari produktivitas lahan pada usahatani padi sawah yang dikelola dalam bentuk bagi hasil tanpa kekerabatan, lebih rendah dibandingkan dengan usahatani padi sawah yang dikelola pemilik-penggarap. Itu menandakan, penggunaan input yang sulit dikontrol oleh pemilik pada usahatani padi sawah yang dikelola dalam bentuk bagi hasil tanpa kekerabatan tidak mengikuti model tersebut, tetapi mengikuti model *unenforceable contract* sehingga tidak optimum.

Preferensi petani terhadap bagi hasil semakin berkurang tetapi terhadap sewa-tunai semakin meningkat dengan semakin majunya perekonomian.

Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini disarankan beberapa hal yaitu:

- (1) Mengacu pada banyaknya usahatani padi sawah yang dikerjakan dalam bentuk bagi hasil dan lebih banyak penyakap yang memperoleh bagian lebih kecil dari pada pemilik, maka penegakan Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH) harus dilakukan lebih intensif di Bali.
- (2) Dalam penegakan UUPBH, upaya untuk menentukan bagian yang adil (*equitable rent*) antara penyakap dan pemilik lahan perlu dilakukan sehingga menjamin hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak. Bagian yang “dibayarkan” kepada pemilik lahan agar proporsional dengan jumlah biaya yang ditanggungnya. Jumlah bunga modal yang diinvestasikan pada

lahan dan investasi lain harus diperhitungkan sebagai biaya yang ditanggung pemilik lahan. Sebaliknya, bunga modal yang diinvestasikan penyakap dan estimasi biaya tenaga kerja yang meliputi tenaga kerjanya sendiri maupun keluarganya harus dipertimbangkan sebagai biaya usahatani. Setelah pengeluaran total dihitung baik tunai maupun tidak tunai, proporsi kontribusi pemilik dan penyakap ditentukan. Proporsi itu digunakan sebagai basis untuk mengalokasikan bagian yang diterima kedua belah pihak. Upaya menentukan *equitable rent* harus didahului dengan kegiatan survai usahatani.

- (3) Mengacu pada semakin meningkatnya posisi penyakap di daerah pariwisata, maka pendekatan ekonomi dalam bentuk memperluas kesempatan kerja luar pertanian harus dipacu di perdesaan (di daerah bukan pariwisata). Dalam hubungannya dengan itu, masalah kekurangan modal di perdesaan diperbaiki melalui perluasan jangkauan dan skema serta peningkatan jumlah kredit yang dialokasikan ke sektor-sektor ekonomi perdesaan.
- (4) Agar penggunaan input efisien pada usahatani padi sawah yang dikerjakan penyakap, beberapa hal perlu dilakukan:
 - (a) Secara berangsur-angsur, mendorong transformasi lembaga bagi hasil menjadi sewa-tunai atau pemilik-penggarap.
 - (b) Sehubungan dengan butir a), kebijakan pembiayaan properti bagi petani, seperti program pinjaman pengadaan lahan usahatani perlu dicanangkan. Program ini sebaiknya di disain dalam jangka-panjang dan bunga rendah untuk membantu petani membeli atau menyewa lahan secara tunai dengan wawasan perluasan skala usahatani.
- (5) Penelitian serupa dengan populasi sasaran petani “campuran” yaitu petani yang mengerjakan lahannya sendiri dan juga mengerjakan lahan milik orang lain (bagi hasil), perlu dilakukan. Dengan demikian, dapat dilihat dengan tegas perbedaan perlakuan petani tersebut terhadap usahatani pada lahan miliknya sendiri dan pada lahan yang disakap.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, I G. Ngurah. 1992. Pembangunan Bali Berwawasan Budaya. Dalam *Majalah Ilmiah Universitas Udayana., Terbitan Khusus No.1*: 1 – 8.
- Bappeda Propinsi Bali. 2001. *Dampak Pariwisata terhadap Aspek Sosial-budaya Masyarakat Bali*. Denpasar.
- Bendesa, I Komang. 1997. *Strategi Pembangunan Daerah Bali dalam Era Globalisasi Suatu (Tinjauan Makro)*. Makalah Dibawakan pada Seminar Nasional Pembangunan Bali menyongsong Abad 21, 26-28 Februari 1997 di Hotel Radison Denpasar, Diselenggarakan Oleh bappeda Tingkat I Bali.
- Biro Pusat Statistik. 1963. *Sensus Pertanian*. Jakarta
- _____. 1983. *Sensus Pertanian*. Jakarta
- _____. 1993. *Sensus Pertanian*. Jakarta
- _____. 2000. Kondisi Sosial Ekonomi Daerah Bali Tahun 1999. Denpasar.
- _____. 2001a. Kecamatan Bebandem Dalam Angka. Denpasar.
- _____. 2001b. Kecamatan Busungbiu Dalam Angka. Denpasar.
- _____. 2001c. Kecamatan Denpasar Selatan Dalam Angka. Denpasar.
- _____. 2001d. Kecamatan Kuta Dalam Angka. Denpasar.
- _____. 2001e. Kecamatan Tembuku Dalam Angka. Denpasar.
- _____. 2001f. Kecamatan Ubud Dalam Angka. Denpasar.
- Chaudhuri, Ananish and Pushkar Maitra. 2000. *Sharecropping Contracts in Rural India: A Note*. Washington State University, URL <<http://www.tricity.wsu.edu/~achaudh/share.pdf>>. (PDF Document). Diakses tanggal 9 April 2001.
- Erawan, Nyoman. 1987. *Peranan Pariwisata dalam Perekonomian Bali: Efek Penggandaan Pengeluaran Wisatawan terhadap Pendapatan Masyarakat*. Desertasi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Faisal Kasryno. 1984. Kerangka Analisa Ekonomi Masalah Pedesaan, dalam *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*. Disunting Oleh Faisal Kasryno, h. 26 - 42. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Gaspersz, Vincent. 1991. Teknik Analisis dalam Penelitian Percobaan. Penerbit Tarsito, Badung.
- Geriya, I Wayan. 1981. Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Bali. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bali, Denpasar.
- Ghatak, Subrata and K. Ingersent. 1984. *Agricultural Economics*. The John Hopkins University Press, Baltimore.
- Gunawan Wiradi dan Makali, 1984. Penguasaan Tanah dan Kelembagaan, dalam *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*. Disunting Oleh Faisal Kasryno, h. 43 - 130. yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Gunawan Wiradi. 1984. Pola Penguasaan Tanah dan reforma Agraria, dalam *Dua setengah Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah pertanian dari masa ke masa*. Disunting oleh Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, h. 286 - 328. Yayasan Obor Indonesia dan PT. Gramedia, Jakarta.
- Hoff, K., A.Braverman, and J.E. Stiglitz. 1993. *The Economics of Rural Organization: Theory, Practice and Policy*. IDRB/World Bank.
- Iman Sudyat. 1981. *Hukum Adat: Sketsa Asas*. Liberty, Yogyakarta.
- Karmana, Maman Haeruman. 1993. *The Impact of Tenurial System on Rice Production in Twi District of West-Java*. Thesis of Doctor (Ph.D.). Faculteit Landbouwkumdigte En Toegepaste Biologische Wetwenschappen, Universiteit Gent.
- Mubyarto. 1993. Sejarah Penelitian Pedesaan. Dalam *Dua Puluh Tahun Penelitian Pedesaan..* Aditya Media, Yogyakarta.
- Murdock, George Peter. 1949. *Social Structure*. The Macmillan Company, New York.
- Pemayun, A.A.G. Putra. *Dampak Perkembangan Pariwisata terhadap Struktur Ekonomi dan Sosial Masyarakat Penjual Lahan di Kelurahan Ubud Kabupaten Gianyar*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.

- Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. 1982. *Gagasan Perheppi: Mengatasi Masalah Petani Gurem dan Buruh Tani di Jawa*. Kesimpulan Pokok Konprensi Internasional Ahli-ahli Ekonomi Pertanian Ke-18 di Jakarta 24 Agustus-3 September 1982, Jakarta.
- Pitana, I Gde. 1992. Daya Dukung Bali terhadap Kepariwisata dan Sosial Budaya. Dalam *Majalah Ilmiah Universitas Udayana.*, Terbitan Khusus No.1: 62 - 70.
- Raka, I Gusti Gde. 1955. *Monografi Pulau Bali*. Bagian Publikasi Pusat Djawatan Pertanian Rakjat, Jakarta.
- Ray, Tridip dan NirvikarSingh. 2000. *Limited Liability, Contractual Choice, and The Tenancy Ladder*. Hongkong University of Science, Url<<http://www.bm.ust.hk/econ/paper/raylimliab.PDF>>. (PDF Document). Diakses tanggal 9 April 2001.
- Roy, Aideep and K. Serfes. 2000. *farming wirh Optimists and Pessimists*. Departement of Economics, The State University of New York, URL<<http://www.tricity.wsu.edu/~achaudh/contractchoice.pdf>> (PDF Document). Diakses tanggal 10 April 2001.
- Ruttan, Vernon W. 1985. Tiga Kasus Terjadinya Pembaruan Kelembagaan. Dalam *Dinamika Pembangunan Pedesaan*. Faisal Kasryno dan J.F. Stepanek (Penyunting), h. 114 - 140. PT Gramedia, Jakarta.
- Sadoulet, E., Alain de Janvry, Seiichi Fukui. 1997. *Appendix:: The Meaning of Kinship in Sharecropping Contracts*. Departement of Agricultural Economics University of California, URL<<http://are.barkley.edu/~sadoulet/pepers/sharecpp.pdf>>. (PDF Document). Diakses tanggal 10 April 2001.
- Sajogjo. 1976. Pertanian, Landasan Tolak Bagi Pembangunan bangsa Indonesia. Dalam *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Ditulis oleh C. Geertz, Diterjemahkan oleh S. Supomo, h. xxi - xxxi. Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
- _____. 1983. *Sensus Pertanian 1983: Profil Rumah Tangga Pertanian, Pola Pemilikan Tanah, dan Masalah Pertanian Berlahan Sempit*. Kerjasama Biro Pusat Statistik dan Institut pertanian Bogor. Biro Pusat statistik, jakarta.
- Scheltema, A.M.P.A. 1985 *Bagi hasil di Hindia Belanda*. Diterjemahkan oleh Marwan dan Disunting oleh Gunawan Wiradi dan Suyono Hb. Yayasan Obor, Jakarta
- Schwimmer, B. 1995. *Introduction Kinship*. University of Manitoba, URL<<http://www.umanitoba.ca/faculties/arts/anthropology/tutor/fundamental/index.html>>.Page-1. Diakses tanggal 11 April 2001.
- Scott, James C. 1981. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Diterjemahkan oleh Hasan basari dan Disunting oleh Bur Rusuanto. LP3ES, Jakarta.
- Scott, James C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Diterjemahkan oleh Budi Kusworo, Hira Jhamtani, Mochtar Pabotinggi, dan Gunawan Wiradi. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soeharjo, A dan D. Patong. 1973. *Sendi-sendi Pokok Ilmu Usahatani*. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Soemardjan, Selo. 1970. The Influence of Social Structure on The Javanese Peasant Economy. In *Subsistence Agriculture and Economic Development*. Clifton R. Wharton, Jr. (Ed). 41- 99. Aldine Publishing Company, Chicago.
- Sudradjat Sutawidjaja, M. 1993. *Statistika Terapan*. Diktat Kuliah. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Suryawan Wiranatha, A.A.P.A. 2001. A System Model for Regional Planning Toward Sustainable Development in Bali, Indonesia. Thesis for The Degree of PhD. Department of Geographical Science and Planning The University of Queensland.
- Sutjipta, Nyoman dan Wayan Windia. 1990. *Profil Pertanian Di Daerah Bali*. Universitas Udayana, Denpasar.
- Suardi, Herman. 1982. Respon Masyarakat Desa terhadap Modernisasi di Bidang Produksi Pertanian di Jawa Barat. Dalam *Bunga Rampai Perekonomian Desa*. Disunting oleh Sajogjo, h. 102 -129. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Yang, W.Y. 1965. *Method of Farm management Investigation for Improving Farm Productivity*. Revised Edition. FAO of UN, Rome.